

TESIS

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI KATALOG
ELEKTRONIK SEKTORAL DI BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

NIKO MUHAMMAD INSANI, S.H.
NIM. 2320119009



Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Ferdi , S.H., M.H**
2. **Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DI BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT

(Niko Muhammad Insani, 2320119009, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Pelaksanaan katalog elektronik dengan penerapan prinsip kehati-hatian di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat merupakan suatu kebutuhan yang strategis. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya tantangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama di sektor konstruksi, yang tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan percepatan belanja negara, tetapi juga menyangkut akuntabilitas, transparansi, efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul, antara lain: risiko hukum, potensi terjadinya *fraud*, hingga kerugian keuangan negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis data primer yang diperoleh dari wawancara, data keadaan lapangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin penting dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat serta kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat dalam implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah melakukan penelitian berupa wawancara dan pemberian kuesioner kepada pihak terkait di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat terlibat dalam pelaksanaan katalog elektronik sektoral ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan regulasi teknis yang belum sepenuhnya mengatur secara rinci pelaksanaan pengadaan melalui katalog terkhusus untuk pekerjaan konstruksi, selain itu, terdapat kendala pada sistem aplikasi katalog elektronik yang belum mampu mendukung proses evaluasi secara komprehensif dan *real time* dan terbatasnya jumlah penyedia dalam katalog yang belum dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan secara merata di beberapa wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan katalog elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: *prinsip kehati-hatian, katalog elektronik, penyedia jasa*

**IMPLEMENTATION OF THE PRUDENTIAL PRINCIPLE IN THE
SELECTION PROCESS OF CONSTRUCTION SERVICE
PROVIDERS THROUGH THE SECTORAL ELECTRONIC CATALOG
AT THE NATIONAL ROAD IMPLEMENTATION AGENCY
OF WEST KALIMANTAN**

**(Niko Muhammad Insani, 2320119009, Master of Law Studies Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2025)**

ABSTRACT

The implementation of the electronic catalogue by applying the prudential principle at the National Road Implementation Agency of West Kalimantan constitutes a strategic necessity. This is driven by the increasing complexity of challenges in government procurement, particularly in the construction sector, which not only involves the efficiency and acceleration of state budget spending but also demands accountability, transparency, and effectiveness in the management of procurement processes within the Ministry of Public Works. The application of the prudential principle aims to minimize various risks that may arise, including legal risks, the potential for fraud, and state financial losses. This study adopts a juridical-empirical approach by analyzing primary data obtained through interviews, field observations, and a review of relevant statutory regulations. The main focus of this research is to examine the implementation of the prudential principle in the selection process of service providers using the e-purchasing method through the sectoral electronic catalogue at the National Road Implementation Agency of West Kalimantan, as well as to identify the challenges faced in applying this principle within the framework of the Ministry of Public Works and Housing's procurement system. Based on the results of interviews and questionnaires conducted with relevant stakeholders at the National Road Implementation Agency of West Kalimantan involved in the implementation of the sectoral electronic catalogue, the study concludes that there are significant technical regulatory limitations that do not yet comprehensively govern the procurement process through the catalogue, particularly for construction works. In addition, the electronic catalogue system still lacks the capability to support comprehensive and real-time evaluations, and the limited number of listed providers in the catalogue has not been sufficient to meet construction service needs evenly across all regions. Therefore, the findings of this study are expected to contribute meaningfully to the improvement and further development of the electronic catalogue implementation within the Ministry of Public Works in the future.

Keywords: prudential principle, electronic catalogue, service provider